

**EVALUASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT (PHBM) DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH)
SEMARANG (STUDI DI LMDH SUMBER REJEKI)**

Oleh:

Khairunnisa Cendrasari, Ari Subowo

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Collaboration Forest Resource Management (PHBM) is a system of forest management conducted jointly by Perum Perhutani and forest village communities with interested parties (stakeholders) with the spirit of sharing that common interest to achieve sustainability of the functions and benefits of forest resources can be realized optimally and the improvement of the Human Development Index (HDI) which is flexible, adaptive, participatory, and accommodating PHBM as one form of social forestry is done to achieve sustainable forestry and forest communities prosper. However, the losses suffered due to illegal logging in the KPH Semarang is still high and has not decreased. Therefore, evaluation of which examines patterns in KPH Semarang management and the impact of PHBM for the forest village communities. This study focused on one LMDH namely LMDH Rejeki as a criterion independently LMDH. This study uses research methods qualitative descriptive. Data in this study were obtained from interviews with informants, observation and documents.

The results of this study indicate that evaluation of Collaboration Forest Resource Management (PHBM) in KPH Semarang especially LMDH Rejeki has a management scheme implemented fairly well and in accordance with the conditions and the social dynamics of the community. Although there are still obstacles that are destroying the forests and their elements are decimating pohon. Forest Resource Management with Community has given the social and economic impact on society Kalikurmo Village of increased education, health, and positively impact the purchasing power masyarakat. Besides the positive effects, there are also some which impacts arising rift between Perum Perhutani officers with Kalikurmo Village community, institutional vacuum LMDH Rejeki, and lack of capital to develop productive enterprises.

Kata Kunci : Analisis, Pelayanan Publik, Kepuasan Masyarakat

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wewenang pengelolaan sumber daya hutan sebelum tahun 1999 dikuasai sepenuhnya oleh negara, melalui Perum Perhutani dan Pemerintah Pusat. Dengan pelaksanaan otonomi daerah telah memberi implikasi penting dalam pembuatan kebijakan kehutanan dari sentralistis menjadi terdesentralisasi pada pemerintah daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah melalui Menteri Kehutanan mengeluarkan surat keputusan No. 31/KPTS-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKM). Menindaklanjuti Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan tersebut pemerintah provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, adaptif, partisipatif, dan akomodatif.

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Jawa Tengah diawali dengan terbitnya Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 136/KPTS/DIR/2001 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001.

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Jawa Tengah yang terdiri dari 20 Kesatuan Pemangkuan Hutan salah satunya adalah KPH Semarang.

Permasalahan yang terjadi di KPH Semarang yaitu terjadi peningkatan hasil produksi dari tahun 2012 hingga 2014. Tahun 2012 hasil produksi sebesar Rp 89.672.684,-. Kemudian tahun 2013 hasil produksi meningkat menjadi Rp 119.400.952,-. Tahun 2014 meningkat pesat sebesar Rp 535.738.633,-. (Data Sharing Produksi Perum Perhutani KPH Semarang Tahun 2015) Namun keamanan hutan tahun 2012-2014 di KPH Semarang tidak mengalami penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun yaitu tahun 2012 sebanyak 712 pohon kemudian terjadi penurunan pada tahun 2013 menjadi 349 pohon, tahun 2014 jumlah kerugian fisik mengalami peningkatan daripada tahun 2013 yakni sebanyak 598 pohon. (Rekapitulasi Data Pencurian Kayu Tahun 2011-2015 Perum Perhutani KPH Semarang)

Melihat permasalahan tersebut, maka fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pola Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat apakah sudah sesuai dengan tujuan PHBM itu sendiri dan bagaimana dampak PHBM bagi masyarakat desa hutan di wilayah KPH Semarang. Apakah dengan masih tingginya tingkat gangguan keamanan hutan di KPH Semarang yang dapat berpengaruh terhadap *sharing* produksi, mempengaruhi dampak bagi masyarakat desa hutan. Dengan melihat dampak PHBM bagi masyarakat, maka dapat diketahui apakah hasil yang diinginkan dari PHBM sudah tercapai.

B. TUJUAN

1. Untuk mengetahui pola Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Hutan Semarang khususnya di LMDH Sumber Rejeki
2. Untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat terhadap

masyarakat Desa Kalikurmo (LMDH Sumber Rejeki).

C. KERANGKA TEORI

1. Administrasi Publik

George J. Gordon (dalam Inu Kencana Syafie, 2006:25) yang mengatakan bahwa administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses yang baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.

2. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye dalam Budi Winarno (2007:15) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan

3. Evaluasi Kebijakan Publik

Anderson (dalam Budi Winarno, 2008:166) mengungkapkan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak.

4. Fungsi Evaluasi

Wibawa dkk (dalam Riant Nugroho, 2014:715) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- 1) Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.
- 2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik

birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

- 3) Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- 4) Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosia-ekonomi dari kebijakan tersebut.

5. Tipe-tipe Evaluasi

Finsterbusch dan Motz (Wibawa dkk, 1994: 74-75) yang mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) tipe evaluasi yang digambarkan dengan tabel berikut:

1. *Single program after only*, Pengukuran dengan desain ini mengukur kondisi kelompok sasaran hanya sesudah program berlangsung, tanpa menggunakan kelompok kontrol. Hasil akhirnya adalah pada keadaan kelompok sasaran kebijakan.

2. *Single program before-after*, Pengukuran dengan desain ini mengukur kondisi kelompok sasaran sebelum dan sesudah program berlangsung, tanpa menggunakan kelompok kontrol. Hasil akhirnya adalah pada perubahan keadaan kelompok sasaran kebijakan

3. *Comparative after only*, Pengukuran dengan desain ini mengukur kondisi kelompok sasaran hanya sesudah program berlangsung, dengan menggunakan kelompok kontrol. Hasil akhirnya adalah pada perubahan keadaan kelompok sasaran dan bukan kelompok sasaran kebijakan.

4. *Comparative before-after*, Pengukuran dengan desain ini mengukur kondisi kelompok sasaran

sebelum maupun sesudah program berlangsung, dengan menggunakan kelompok kontrol. Hasil akhirnya adalah pada efek program terhadap kelompok sasaran kebijakan.

Dari empat tipe evaluasi ini peneliti menggunakan evaluasi *single program after only*.

6. Kriteria Evaluasi

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria kebijakan publik sebagai berikut:

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: William N. Dunn (2000:610)

D. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif deskriptif menurut Sugiyono (2008:15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif deskriptif bermaksud

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

2. Situs Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti tidak akan melaksanakan di seluruh wilayah kerja KPH Semarang, peneliti memilih desa yang sudah tergolong LMDH Mandiri di KPH Semarang yaitu LMDH Sumber Rejeki di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah

- 1) Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Lahan (SDHL) KPH Semarang;
- 2) Staf Sub Seksi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) KPH Semarang;
- 3) Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang;
- 4) Asisten Perum Perhutani BKPH Tempuran KPH Semarang;
- 5) Ketua LMDH Sumber Rejeki;
- 6) Anggota LMDH Sumber Rejeki;
- 7) Kepala Desa Kalikurmo.

4. Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subyek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan jenis data yang digunakan yaitu catatan lapangan, sumber tertulis, foto/rekaman.

5. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni:

1) Data Primer

Data primer yang diperoleh berbentuk hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang berasal dari para pelaku yang terkait dalam penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah PHBM yang akan diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a) Observasi

Observasi menurut Ngilim Purwanto (1985) ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan mengamati individu atau kelompok secara langsung. (Basrowi dan Suwandi, 2008:93-94)

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu (Basrowi dan Suwandi, 2008:127).

c) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Basrowi dan Suwandi (2008:158) merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan

7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2013:89)

8. Kualitas Data

Di dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

PEMBAHASAN

1. Pola Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Hutan Semarang Khususnya di LMDH Sumber Rejeki

a. Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan (William Dunn, 2000:429). Efektivitas menunjukkan keberhasilan berdasarkan tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) telah mampu meningkatkan tanggung jawab dan peran Perum Perhutani, masyarakat, dan stakeholders dalam

menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan. Akses yang diberikan kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan berupa tumpang sari pun dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Kegiatan PHBM telah sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan dilihat dari pola tanam tumpang sari yang sudah sesuai dengan keinginan masyarakat serta dapat mengembangkan keanekaragaman jenis dan komoditi kehutanan, pertanian, dan peternakan yang ada di Desa Kalikurmo.

LMDH Sumber Rejeki sebagai LMDH Mandiri juga telah memiliki usaha produktif berupa ternak sapi yang diperoleh dari dana swadaya masyarakat. Adanya usaha produktif merupakan salah satu tujuan dari PHBM untuk melestarikan hutan karena dengan adanya usaha produktif masyarakat memiliki kegiatan sehingga tidak menebang pohon di hutan. PHBM di Desa Kalikurmo LMDH Sumber Rejeki juga telah mendukung keberhasilan pembangunan daerah karena dengan adanya PHBM masyarakat mendapat kewenangan untuk mengelola hutan sehingga mereka dapat memanfaatkan lahan hutan sebagai sumber mata pencaharian yang berdampak pada peningkatan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan, sinergitas antara Perum Perhutani, Pemerintah Daerah, dan stakeholder dinilai masih kurang komunikasi. Berdasarkan hasil pengamatan di LMDH Sumber Rejeki, Pola Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat KPH Semarang berjalan cukup efektif.

b. Efisiensi

Menurut William Dunn (2000:430) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Jika efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh, sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, dan cara agar dalam pelaksanaannya menjadi tepat waktu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat di desa hutan Kalikurmo mengingat sebagian besar masyarakat Desa Kalikurmo bekerja di bidang tanaman pangan, sedangkan penduduk desa tidak mempunyai lahan yang cukup untuk bertani. Dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, masyarakat diberikan wewenang untuk ikut serta dalam mengelola hutan. Salah satu kegiatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat adalah tumpang sari. Tumpang sari merupakan teknik penanaman di bawah tegakan yang dikelola oleh masyarakat yang hasilnya untuk masyarakat sendiri. Dalam tumpang sari masyarakat dibebaskan untuk menanam tanaman palawija sesuai dengan keinginan mereka. LMDH Sumber Rejeki Desa Kalikurmo memilih tanaman jagung sebagai tanaman tumpang sari, dimana hasil dari tumpang sari tersebut

merupakan sumber pendapatan utama masyarakat desa. Tumpang sari tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat desa hutan saja, namun juga bagi Perum Perhutani karena dengan adanya tumpangsari berarti masyarakat ikut menjaga dan memelihara hutan, agar disekitar tanaman pokok tidak tumbuh ilalang. Sayangnya, tanaman tumpangsari hanya diperbolehkan selama dua tahun umur tanaman pokok per petak hutan, sehingga setelah dua tahun masyarakat tidak dapat menanam lagi hingga tanaman pokok tersebut panen atau ditebang, akibatnya masyarakat merasa pendapatan mereka berkurang sehingga terkadang sebagian kecil dari mereka memangkas daun-daun tanaman pokok agar mereka dapat meneruskan tumpang sari. Disamping tumpangsari, LMDH Sumber Rejeki juga memiliki usaha produktif berupa ternak sapi, ternak sapi tersebut ada yang milik kelompok ada pula milik perseorangan. Walaupun LMDH Sumber Rejeki belum pernah mendapat hasil sharing, namun modal dari usaha produktif mereka berasal dari swadaya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di LMDH Sumber Rejeki berjalan dengan efisien.

c. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan (William Dunn, 2000:430). Hal ini berarti sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan

dilaksanakan, harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai.

Sejak adanya Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di LMDH Sumber Rejeki masyarakat menjadi paham akan pentingnya memelihara dan menjaga hutan, hal ini sesuai dengan tujuan dari PHBM itu sendiri yaitu meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat. Masyarakat Desa Kalikurmo berusaha untuk menjaga dan memelihara sumber daya hutan karena mereka sadar bahwa kehidupan masyarakat desa bergantung pada hasil hutan sehingga saat ini masyarakat sudah tidak menebangi pohon-pohon di hutan. Namun, masih ada oknum-oknum yang mencuri atau menebangi pohon-pohon di hutan untuk acara-acara besar tertentu dan masyarakat tidak mau disalahkan karena kejadian tersebut karena mereka merasa menjaga hutan bukanlah profesi mereka namun merupakan tanggung jawab dari Perum Perhutani. Meski begitu kegiatan-kegiatan yang ada dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di LMDH Sumber Rejeki mampu mengurangi pencurian kayu karena kegiatan-kegiatan tersebut memberikan pendapatan bagi masyarakat desa hutan dan kegiatan-kegiatan tersebut berada didalam kawasan hutan sehingga masyarakat ikut serta dalam menjaga hutan. Hal ini berarti Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat cukup mampu mencapai tujuannya.

d. Perataan

Menurut Dunn (2000:434), kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah

kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan publik kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi namun mungkin ditolak karena menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata.

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Meskipun tidak seluruh masyarakat paham tentang PHBM, namun seluruh masyarakat dapat merasakan dampak dari PHBM tersebut dengan adanya peningkatan pendapatan yang berdampak pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Seluruh masyarakat yang merupakan anggota LMDH Sumber Rejeki mendapat hak untuk ikut mengelola sumber daya hutan dan mendapat hak untuk mendapat sharing. Sayangnya, LMDH Sumber Rejeki belum pernah panen. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena masyarakat Desa Kalikurmo sendiri tidak mengharapkan adanya sharing, mereka justru berharap pada tanaman tumpang sari. Hasil dari tanaman tumpang sari itulah yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Bahkan mereka berpendapat, apabila lahan hutan tidak diperbolehkan dikelola oleh masyarakat maka mereka semua jatuh miskin. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan sudah tercapainya pemerataan yang adil bagi masyarakat Desa Kalikurmo, baik hasil dan manfaat dari Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.

e. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (William Dunn, 2000:437). Responsivitas berkaitan dengan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan secara nyata dapat mencerminkan kebutuhan, prefensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu.

Kegiatan-kegiatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat telah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Bantuan-bantuan yang mereka terima pun berupa pupuk-pupuk dan tanaman yang mereka inginkan, walaupun jumlah bantuan tidak sebanyak yang diharapkan. Hasil dan manfaat dari Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat tidak hanya dirasakan oleh anggota LMDH saja, melainkan oleh seluruh masyarakat desa hutan. Untuk hasil sharing memang hanya anggota LMDH saja yang mendapatkan, namun seluruh masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai anggota LMDH.

f. Ketepatan

Menurut Dunn (2000:438) kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau

lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan mengarah pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan menanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di LMDH Sumber Rejeki Desa Kalikurmo mendapat respon yang baik dari masyarakat, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak hambatan dalam pencapaian tujuannya, PHBM dirasa tepat bagi masyarakat Desa Kalikurmo yang merupakan desa hutan dimana kehidupan masyarakat desa bergantung pada hasil hutan. Masyarakat Desa Kalikurmo merasa dengan diberikannya wewenang untuk ikut serta mengelola hutan kehidupan masyarakat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan mereka menganggap apabila PHBM ditiadakan, maka mereka semua akan jatuh miskin. Meskipun masyarakat belum sepenuh hati dalam menjaga kelestarian hutan, namun mereka sadar bahwa hasil hutan merupakan sumber pendapatan mereka sehingga masyarakat sedapat mungkin memelihara dan menjaga hutan demi kelangsungan hidup mereka.

2. Dampak Sosial dan Ekonomi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Terhadap Masyarakat Desa Kalikurmo (Lmdh Sumber Rejeki)

a. Dampak Sosial

Di dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani No.682/KPTS/Dir/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama

Masyarakat (PHBM) dampak yang ditimbulkan dari aspek sosial sebagai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu peningkatan pendidikan, kesehatan, jejaring kelembagaan, dan hubungan yang harmonis antara petugas Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan oleh LMDH Sumber Rejeki Desa Kalikurmo telah memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Kalikurmo yaitu terjadi peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Pada aspek pendidikan, terjadi peningkatan selama lima tahun terakhir meskipun hanya sedikit, angka melek huruf pun sudah dinyatakan tuntas pada tahun 2006. Jika masih ada masyarakat yang tidak bersekolah maupun meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, faktor utamanya bukan hanya kurangnya pendapatan namun bisa saja hal tersebut berasal dari pola pikir masyarakat terhadap pendidikan. Sedangkan dari aspek kesehatan, masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Memang faktor utama dari peningkatan kesehatan di Desa Kalikurmo yang dilihat dari rendahnya angka kematian ibu dan bayi, rendahnya angka kematian akibat penyakit menular serta angka kematian yang lebih rendah daripada kelahiran bukan karena adanya PHBM ini, namun dengan adanya PHBM ini pendapatan masyarakat menjadi meningkat sehingga secara

tidak langsung berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat desa.

Selain timbulnya dampak positif dari aspek sosial, PHBM di LMDH Sumber Rejeki Desa Kalikurmo juga menimbulkan dampak negatif dimana belakangan ini hubungan antara petugas Perum Perhutani dengan masyarakat desa menjadi kurang harmonis. Hal itu disebabkan bahwa saat ini petugas Perum Perhutani tidak lagi memperkenalkan diri dan melakukan pendekatan dengan masyarakat, petugas merasa cukup dengan hanya berkunjung ke hutan setiap hari. Faktor lain yaitu masyarakat juga sudah merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan, padahal seharusnya keterlibatan masyarakat dimulai dari kegiatan perencanaan hingga pemanenan. Dahulu, pada saat awal dilaksanakannya PHBM masyarakat selalu dilibatkan dalam kegiatan perencanaan dimana tanaman pokok yang akan ditanam dimusyawarahkan dulu dengan masyarakat sehingga ada kesepakatan dalam pemilihan tanaman pokok namun sekarang masyarakat tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan perencanaan. Sedangkan dari aspek kelembagaan LMDH Sumber Rejeki berjalan baik pada awal pelaksanaan, untuk saat ini PHBM tetap berjalan sesuai dengan ketentuan namun tidak mengalami perkembangan karena vakumnya kelembagaan. LMDH Sumber Rejeki sudah tidak pernah mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan lembaga, usaha produktif, dan kegiatan PHBM lainnya. LMDH Sumber Rejeki melakukan pertemuan dengan cara

ikut dalam acara-acara desa sebagai formalitas untuk laporan.

b. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi yang diharapkan sesuai dengan indikator keberhasilan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah meningkatnya usaha produktif dan daya beli masyarakat. Usaha produktif yang dijalankan oleh LMDH Sumber Rejeki yaitu ternak sapi, selain milik kelompok ternak sapi juga milik pribadi anggota LMDH.

Usaha produktif di LMDH Sumber Rejeki dikelola dengan cukup baik, akan tetapi usaha produktif belum dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai kategori LMDH Mandiri, seharusnya LMDH Sumber Rejeki sudah dapat mengembangkan usaha produktif berupa koperasi atau simpan pinjam, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena kurangnya modal. Selain itu masyarakat Desa Kalikurmo juga sudah merasa cukup dengan penghasilan yang didapatkan dari hasil tumpang sari. Pihak Perum Perhutani dan stakeholders sudah pernah memberikan sosialisasi untuk mengembangkan usaha produktif seperti pembuatan tape dari ketela, namun hal tersebut tidak dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat Desa Kalikurmo.

LMDH Sumber Rejeki sebenarnya memiliki keinginan untuk menambah hewan ternak sebagai usaha produktifnya namun karena LMDH belum pernah mendapatkan sharing produksi yang

dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan tidak adanya tanggapan dari proposal pengajuan modal usaha dari Perum Perhutani maka rencana tersebut belum bisa direalisasikan.

Sejak adanya Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) penghasilan masyarakat Desa Kalikurmo mengalami peningkatan yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Dapat dilihat pada tahun 2013 jumlah kemampuan daya beli masyarakat mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh data tahap keluarga sejahtera. Lahan yang dikelola oleh masyarakat dengan sistem tumpang sari memberikan lapangan pekerjaan masyarakat Desa Kalikurmo yang bekerja sebagai petani hutan, karena lahan milik pribadi saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan ada beberapa petani yang tidak mempunyai lahan untuk digarap jika tidak ada lahan dari Perum Perhutani tersebut dalam rangka PHBM. Di dalam sistem tumpang sari setiap petak hutan sudah dibagi kepemilikannya sehingga masing-masing anggota LMDH mempunyai hak petak hutan untuk dikelola. Masyarakat sangat bergantung pada hasil dari tumpang sari karena sebagian besar masyarakat Desa Kalikurmo bekerja sebagai petani hutan. Oleh karena itu, Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat Desa Kalikurmo.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

- 1) Aspek-aspek pada pola Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang khususnya di LMDH Sumber Rejeki yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan PHBM yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani No.682/KPTS/Dir/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tidak semua dapat tercapai. Tanggung jawab dan peran Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dalam mengelola dan menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan belum dapat mencapai tujuan PHBM. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya gangguan keamanan hutan di LMDH Sumber Rejeki dan belum ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasinya. Upaya Perum Perhutani dalam memberikan akses untuk mengelola hutan dengan sistem tumpang sari dapat mencapai tujuan PHBM, meskipun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya namun tumpang sari mampu memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat Desa Kalikurmo. Kegiatan dalam PHBM sudah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat Desa Kalikurmo karena telah sesuai dengan keinginan masyarakat. Usaha produktif yang dikelola oleh LMDH Sumber Rejeki untuk menambah penghasilan berupa ternak sapi. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat melalui tumpang sari telah membantu program pemerintah yaitu Program Ketahanan Pangan sehingga sinergitas antara Perum Perhutani, pemerintah daerah dan

stakeholders cukup baik meskipun masih kurang komunikasi dalam mengembangkan PHBM. Hubungan antara Perum Perhutani, pemerintah daerah dan stakeholder menghasilkan sinergitas yang baik sesuai dengan tujuan PHBM. Kegiatan-kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat mendukung keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sesuai dengan tujuan PHBM.

- 2) Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) telah memberikan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat Desa Kalikurmo berupa peningkatan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Selain dampak positif, ada pula dampak yang timbul beberapa tahun ini yaitu kurang harmonisnya hubungan antara petugas Perum Perhutani dengan masyarakat Desa Kalikurmo, vakumnya kelembagaan LMDH Sumber Rejeki, dan kurangnya modal untuk mengembangkan usaha produktif. Dampak tersebut timbul akibat kurang dilibatkannya anggota LMDH Sumber Rejeki dalam kegiatan perencanaan dan kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh petugas Perum Perhutani yang baru. Meskipun begitu masyarakat merasa dengan adanya PHBM kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera karena hasil dari tanaman tumpang sari merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat Desa Kalikurmo, oleh karena itu PHBM di Desa Kalikurmo dapat dikatakan berhasil dalam mensejahterakan masyarakat desa hutan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di KPH Semarang (LMDH Sumber Rejeki) layak untuk

dilanjutkan dan perlu adanya peningkatan. Maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi antara Perum Perhutani KPH Semarang, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Semarang, LMDH Sumber Rejeki, serta masyarakat desa hutan Kalikurmo terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan mengadakan kegiatan yang dapat mengurangi gangguan keamanan hutan.
- 2) Memperhatikan partisipasi masyarakat dan melibatkan masyarakat Desa Kalikurmo dalam berbagai kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan hingga evaluasi sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga dan memelihara hutan.
- 3) Membimbing anggota LMDH untuk mengaktifkan kembali kelembagaan LMDH Sumber Rejeki dengan memberikan sosialisasi atau studi banding ke daerah lain yang kelembagaannya berjalan dengan baik.
- 4) Melakukan pendekatan terhadap masyarakat Desa Kalikurmo yaitu dengan aktif bersosialisasi dengan masyarakat, turut hadir dalam acara-acara desa, mengadakan pertemuan rutin agar petugas Perum Perhutani dengan masyarakat saling mengenal kembali dan memiliki hubungan yang kekeluargaan yang erat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kencana Syafie, Inu. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med. Press.

Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med. Press.

DOKUMEN

Data Sharing Produksi Perum Perhutani KPH Semarang Tahun 2015

Rekapitulasi Data Pencurian Kayu Tahun 2011-2015 Perum Perhutani KPH Semarang

Keputusan Direksi Perum Perhutani No.682/KPTS/Dir/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)